

ABSTRAK

Seiring perjalanan kriminalisasi terhadap para pecandu narkoba, ketentuan pidana yang telah ditentukan ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkoba. Keputusan yang diambil hakim dalam proses peradilan pelaku tindak pidana narkoba haruslah berkemanfaatan dalam memberikan hukuman kepada para pelaku yang mana disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada untuk memberikan efektifitas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui peran hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) tinjauan yuridis terhadap tindak pidana narkoba, (2) eksistensi hakim dalam pelaksanaan peradilan pelaku tindak pidana narkoba, (3) kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana narkoba dan solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dalam UU Narkoba, ternyata ada perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, ada yang dilarang dan diancam dengan sanksi (pidana mati, penjara dan denda), sehingga terlihat beberapa aspek pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, (2) Eksistensi Hakim dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana narkoba yang berdasarkan analisa pada perkara Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Mgg, tidak salah bila dikategorikan juga sebagai seorang yang berpikir *scientific*. sebagai mana terlihat dalam pengambilan putusan, di mana hakim tidak semata-mata bekerja untuk membuat dan menetapkan putusan dengan melihat dan menerapkan secara bulat-bulat aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak melainkan hakim senantiasa melihat masalah yang dihadapi dalam konteks yang lebih luas. Dilihat dari pertimbangan hakim dalam melihat kasus terdakwa Carolina Umarela dengan melihat hal yang memberatkan, (3) kendala yang dihadapi majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di Persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan dalam di Persidangan, kurangnya alat bukti. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu keyakinan hakim, kemandirian hakim, mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh.

Kata Kunci : Eksistensi Hakim, Peradilan Pidana, Tindak Pidana Narkoba.

ABSTRACT

Along with the criminalization of narcotics addicts, the stipulated criminal provisions apparently cannot also reduce narcotics abuse. Decisions taken by judges in the judicial process of narcotics offenders must be useful in providing sentences to perpetrators which are accompanied by existing considerations to provide effectiveness in the prevention and eradication of narcotics abuse through the role of judges.

This study aims to review and analyze: (1) a juridical review of narcotics crime, (2) the existence of judges in the implementation of justice for narcotics offenders, (3) obstacles faced by judges in deciding cases of narcotic offenders and solutions in overcoming obstacles.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Then secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) In the Narcotics Act, it turns out that there are acts that are allowed under certain conditions, some are prohibited and threatened with sanctions (capital punishment, imprisonment and fines), so that several aspects of criminal acts are seen against banned. Criminal provisions contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics formulated in Chapter XV Criminal Provisions Article 111 to Article 148, (2) The existence of a Judge in the conduct of narcotics criminal trials based on analysis in case Number 70 / Pid.Sus / 2018 / PN Mgg, it is not wrong if it is categorized also as someone who thinks scientifically. as seen in the decision-making, where the judge does not merely work to make and determine the decision by looking and applying unanimously abstract legal rules but the judge always sees the problem faced in a broader context. Judging from the judge's consideration in seeing the case of the defendant Carolina Umarela by looking at incriminating matters, (3) the obstacles faced by the panel of judges in the conviction of narcotics abuse perpetrators include witnesses who were absent and gave false statements at the Court, the defendant did not tell the truth and does not recognize acts in court, lack of evidence. The solution to overcome these obstacles is the judge's conviction, the independence of the judge, referring to other facts obtained.

Keywords: Judge Policy, Criminal Case, Alternative Indictment